



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Telp. 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTRA PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

DASAR .

1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Kepala Lembaga Persandian Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil sandi di Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pergub No. 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Gubernur Nomor 040/9 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah.
11. Tupoksi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :
 - a. tugas ; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dansistem komunikasi intra pemerintah.
 - b. Fungsi :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mewujudkan visi Jawa Tengah “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, maka harus didukung dengan proses pembangunan disegala bidang. Untuk mendapatkan gambaran kondisi dan kebutuhan yang riil di masyarakat, perlu adanya komunikasi dan koordinasi di jajaran perangkat daerah dan masyarakat.
2. Kegiatan komunikasi sudah pasti dilakukan untuk berkoordinasi, baik secara internal ataupun eksternal. Maka dari itu, pemerintah wajib melakukan fasilitasi sarana komunikasi yang lengkap, aman dan memadai dengan Video Converence.

3. Kegiatan dukungan fasilitasi dan pengadaan peralatan Video converence dimaksudkan sebagai media yang efektif dan efisien dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan dialog interaktif dengan jajaran SKPD Provinsi maupun dengan masyarakat luas dimanapun berada dan pada beberapa tempat sekaligus secara bersamaan.

6. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud peningkatan pemanfaatan persandian daerah dengan pengelolaan sistem informasi intra pemerintah dan kegiatan video converence agar informasi dan komunikasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan agar pemerintah dan masyarakat tetap dapat terus melangsungkan komunikasi yang aman.

7. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Secara berkala telah dilakukan Video converence dalam kegiatan Musrenbangwil dan kegiatan-kegiatan pejabat daerah di jajaran Organisasi Pemerintah Daerah Pemerintah Prov Jateng dan Kab/Kota se Jateng;
2. Melakukan koordinasi dan monitoring dengan Instansi / unit kerja terkait.
3. Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangwil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Fasilitasi pengelolaan sistem informasi intra pemerintah.

8. SASARAN

1. Meningkatkan Koordinasi, konsultasi, pengawasan dan pengendalian pengamanan persandian dan informasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Vertikal.
2. Meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi intra pemerintahan.
3. Terciptanya pola hubungan komunikasi persandian untuk keamanan informasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Vertikal sesuai prosedur dan aturan.

9. KELUARAN (Output)

1. Terselenggaranya Pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, monitoring, konsultasi pengamanan persandian dan informasi di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
2. Terselenggaranya jalur komunikasi intra pemerintahan yang cepat, tepat, hemat dan selamat antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
3. Terselenggaranya jalur komunikasi pimpinan yang aman, efektif dan efisien.

10. MANFAAT (Outcome)

1. Terciptanya jalur/sistem komunikasi, koordinasi dan konsultasi intra pemerintahan yang efektif, efisien dan komprehensif.
2. Terciptanya pola hubungan komunikasi yang keamanan dan memadahi.
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya pendukung persandian.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah untuk keamanan informasi.

11. DAMPAK (Impac)

Meningkatnya kapasitas sumber daya pendukung persandian untuk pengamanan informasi untuk system komunikasi intra pemerintah yang efektif, efisien, aman dan komprehensif.

12. RENCANA PENGANGGARAN

Dana yang tersedia Rp. 338.500.000,- (Tiga ratus tiga delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.07.01. Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650404 198503 1 006

13. **JADWAL WAKTU PELAKSANAAN**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kegiatan Pengamanan Persandian dan Informasi	338.500.000												
	Belanja Barang / Jasa													
	1. Belanja Pegawai	143.640.000												
	2. Belanja Barang Habis Pakai	7.503.000												
	3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian ke Dalam dan Luar daerah)	187.357.000												

Semarang, Mei 2019

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650404 198503 1 006